

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undang-undang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, ekonomi dan lestari.

Sektor kehutanan juga memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru dunia tetapi juga sebagai sumber daya alam yang mendukung kehidupan ekonomi, sosial masyarakat. pengelolaan hutan yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, termasuk dalam hal pembiayaan dan pengalokasian anggaran. Disinilah peran strategis Dinas Kehutanan sebagai perangkat daerah yang menjalankan kebijakan kehutanan pemerintah pusat maupun daerah sangat diperlukan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kehutanan menyusun berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, serta mendorong pemanfaatan hasil hutan yang berkelanjutan. Untuk pelaksanaan program tersebut, dibutuhkan sistem penganggaran yang transparan, efisien, dan akuntabel. Prosedur penganggaran menjadi salah satu tahapan yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas

Kehutanan. Dengan prosedur yang jelas dan tepat, program dapat berjalan sesuai rencana, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Berbagai ketentuan dan regulasi, seperti Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021, serta peraturan menteri dan direktur jenderal, mengatur tata cara penyusunan, pengajuan, dan pertanggungjawaban anggaran di bidang kehutanan. Namun, ketidakpatuhan terhadap prosedur ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah, mulai dari sanksi administratif dan pidana hingga terganggunya kinerja program, pemborosan anggaran, dan menurunnya kepercayaan publik. Ketidaksesuaian prosedur penganggaran membuka peluang terjadinya kecurangan seperti korupsi, suap, penggelapan, penggelembungan harga, manipulasi dokumen, hingga penebangan liar yang merugikan negara dan merusak kelestarian hutan (KOMPAS.com,2022). Kasus-kasus yang pernah terjadi menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan pelaksanaan prosedur penganggaran dapat berdampak negatif tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga lingkungan dan sosial.

Penganggaran dalam sektor pemerintahan bukanlah sekedar proses administratif, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari akuntabilitas publik. Prosedur penganggaran meliputi tahapan perencanaan, penyusunan anggaran, pembahasan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut harus sesuai dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPAN) yang berlaku agar dana publik yang dialokasikan benar benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

Namun demikian, dalam praktiknya, prosedur penganggaran seringkali menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah ketidaksesuaian antara perencanaan program dengan alokasi anggaran, keterlambatan dalam proses penyusunan anggaran , minimnya koordinasi antar pihak terkait. Permasalahan tersebut dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan , serta mengurangi kualitas pelayanan publik di sektor kehutanan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Prosedur Penganggaran Program dan Kegiatan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan tentang proses penganggaran program dan kegiatan pada latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana prosedur anggaran program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ?
3. Bagaimana proses penyusunan pelaporan realisasi anggaran pada Dinas kehutanan ?

1.3 Tujuan penulisan

Tujuan dari pelaksanaan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui prosedur anggaran kegiatan dan program Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui proses penyusunan pelaporan realisasi anggaran pada Dinas kehutanan.

1.4 Manfaat Penulisan

Melalui proposal ini manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang yang dilakukan di Dinas Kehutanan .

Berikut manfaat yang didapat bagi ketiga pihak :

1. Bagi Penulis

- a. Dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
- b. Dapat menambah pengetahuan dan informasi serta wawasan di Dinas Kehutanan.
- c. Mendapatkan pengalaman kerja bagi mahasiswa dalam keterampilan praktek.
- d. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Andalas.

2. Bagi Universitas

- a. Dapat meningkatkan reputasi Universitas, terutama dalam bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan publik.

b. Membuka peluang kerjasama antara Universitas dan Institusi Pemerintah.

3. Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca yaitu sebagai penelitian dan referensi pada waktu yang akan datang untuk mempermudah pembaca mendalami topik yang sama.

4. Bagi Perusahaan

Penulisan laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur penganggaran di Dinas Kehutanan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan guna meningkatkan efisiensi dan ketepatan pelaksanaan anggaran. Selain itu, laporan ini juga dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di masa mendatang

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilakukan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang berAlamat Jl. Jaksa Agung R.Soeprapto No.8A,Ulak Karang Sel., Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25173. Kegiatan magang ini dilaksanakan 40 (empat puluh) hari kerja.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Untuk memiliki data yang relevan dan dapat diuji kebenaran nya, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Metode pertama yang dilakukan penulis yaitu, melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan secara bertahap dan terstruktur. penulis juga melakukan pengamatan dan mengumpulkan dokumen dokumen yang terjadi di lapangan agar penulis mendapatkan informasi lebih lanjut.

2. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data kedua yaitu dengan mengumpulkan informasi referensi materi dari berbagai sumber buku, jurnal dan informasi dari artikel yang terkait untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penulis.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 BAB yaitu, sebagai berikut:

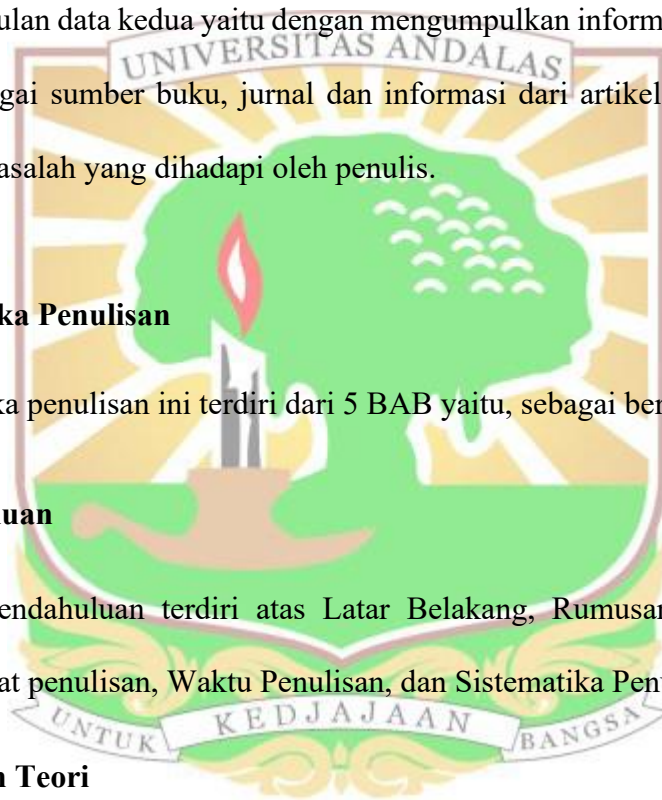
Bab 1: Pendahuluan

Bab ini berisi Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat penulisan, Waktu Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

Bab 2: Landasan Teori

Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai teori pendukung yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas oleh penulis

Bab 3: Gambaran Umum



Bab ini gambaran Umum berisi tentang mengenai gambaran umum perusahaan yang terdiri dari Profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, budaya kerja, dan struktur organisasi pada Dinas Kehutanan.

Bab 4: Pembahasan

Bab ini pembahasan berisi mengenai tentang prosedur penganggaran program dan kegiatan pada dinas kehutanan provinsi sumatera barat

Bab 5: Penutup

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang berhubungan dengan pelaksanaan magang yang dilaksanakan oleh penulis.

